

Mr Clean Beraksi Lagi

AMRAN COPOT PEJABAT KORUP KEMENTAN

Gebrakan Mr Clean--julukan untuk Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman-- untuk membersihkan Kementan masih terus berlanjut. Terbaru, dia menciduk pejabat eselon II yang menerima suap proyek Rp700 juta. Kemudian, Mentan pun langsung mencopot pejabat tersebut. Ini bukan kali pertama Mentan melibas korupsi di wilayah kerjanya. Sebelumnya pada Kamis (17/10/2024), Amran mencopot 3 pegawai pada jabatan eselon II dan III karena meminta komisi hingga Rp10 miliar dari proyek-proyek yang masuk ke Kementan. Artinya, kurang dari dua pekan sudah 4 pejabat korup yang diberhentikan. Dikatakan Amran, langkahnya sesuai dengan 3 pesan khusus Presiden Prabowo Subianto yaitu pencegahan tindak pidana korupsi, efisiensi anggaran, serta mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu 3-4 tahun.

Baca Hal 11....

**Government (Hal.2)
Prabowo Larang
Menteri Bermobil
Impor Mulai
Pekan Depan**

Tanah & bangunan
Rp 42,24 miliar

Kendaraan senilai
Rp 3,42 miliar

Harta bergerak lainnya
Rp 281,73 juta

Surat berharga
Rp 205,53 miliar

Kas dan setara kas
Rp 28,35 miliar

Harta lainnya
Rp 38 juta.

Utang
Rp 293,73 juta.

TOTAL
**RP 279,58
MILIAR**

LHKPN pada
30 Oktober 2019

**Harta
Kekayaan
Amran
Sulaiman**



28 Oktober 2024

Pejabat eselon II yang belum diungkap identitasnya itu dicopot karena diduga terlibat praktik korupsi. Pejabat itu diduga menerima uang pelicin sebesar Rp700 juta. Dari jumlah yang dituduhkan, pejabat ini mengakui menerima Rp 500 juta di antaranya.



17 Oktober 2024

Menyerahkan tiga pegawai Kementan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas dugaan keterlibatan dalam penyimpangan anggaran. Ketiganya diduga melakukan praktik percaloan dengan meminta uang kepada pengusaha hingga mencapai Rp 10 miliar.



10 September 2024

Mentan Amran mencopot Direktur berinisial IM karena terlibat dengan calo dalam pengadaan barang dan jasa, diduga terkait setoran awal 15-20 persen dari nilai kontrak di Kementan..



2016

Dirjen Hortikultura IH yang divopot Mentan Amran ditetapkan sebagai tersangka pada 2016 silam atas kasus pengadaan sarana budidaya mendukung pengendalian OPT, yang merugikan keuangan negara senilai Rp12,947 Miliar.

**Gebrakan
Bersih-bersih
Amran di
Kementan**



Prabowo Larang Menteri Bermobil Impor Mulai Pekan Depan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri sampai pejabat eselon I untuk tidak menggunakan mobil impor. Para pejabat tersebut diminta untuk menggunakan kendaraan buatan Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengungkapkan, mulai minggu depan dia akan mengganti mobil dinas dari Alphard menjadi buatan PT Pindad. Sebabnya, Prabowo meminta untuk menggunakan mobil buatan dalam negeri.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa," kata Anggito dikutip Senin (28/10/2024).

Mobil lokal tersebut mungkin mengarah kepada Maung MV3 buatan PT Pindad. Sebab, belum ada merek nasional lainnya yang menyajikan mobil penumpang. Merek lokal lain, seperti Esemka, saat ini baru memiliki mobil komersial, bukan mobil penumpang.

Diketahui, Pindad Maung MV3 merupakan sebuah SUV dengan mesin turbo diesel 2.200 cc. Mobil itu bisa digeber hingga kecepatan aman 100 km/jam dan memiliki jarak tempuh sampai 500 km.

Saat ini, Maung MV3 ada beberapa versi. Ada Maung MV3 Tangguh dengan atap terbuka, dapat mengangkut 4 orang dan memiliki 5 pintu yang dapat diakses yakni 4 pintu samping dan 1 pintu belakang. Ada juga Maung MV3 Komando yang dilengkapi dengan atap hard top, dan Maung MV3 Jelajah yang dilengkapi dengan atap soft top.

Harga Maung Garuda misalnya diprediksi lebih dari Rp1,2 miliar mengingat kendaraan tersebut memiliki spesifikasi khusus tingkat tinggi. Sebagai gambaran, harga Maung untuk sipil saja, saat ini, berkisar antara Rp1 sampai Rp1,2 miliar. Harganya tentu beda dengan harga Maung Garuda.

Khusus kendaraan dinas pejabat, sebenarnya sudah ada standarnya. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Merujuk pada aturan itu, menteri dan pejabat yang setingkat mendapat jumlah maksimal 2 unit kendaraan sedan dan/atau SUV atau MPV dengan kelas maksimum Kualifikasi A. Sedangkan wakil menteri mendapat jatah satu unit sedan atau SUV/MPV maksimum Kualifikasi A. Kualifikasi A berarti Sedan, SUV, atau MPV dengan mesin 3.500 cc 6 silinder.



Presiden Prabowo menaiki mobil Maung Garuda usai rapat kerja dan retreat Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024). (antara)

Untuk pejabat Eselon IA dan yang setingkat mendapat jatah satu unit sedan atau SUV dengan kelas maksimum Kualifikasi B. Kualifikasi B berarti sedan 2.500 cc empat silinder atau SUV 3.000 cc 6 silinder.

Untuk pejabat Eselon IB dan yang setingkat mendapat jatah satu unit sedan atau SUV dengan kelas maksimum Kualifikasi C. Kualifikasi C berarti sedan 2.000 cc empat silinder atau SUV 2.500 cc 4 silinder.

Berdasarkan aturan itu, berarti menteri, wakil menteri, serta pejabat eselon I bisa saja mendapatkan jatah mobil dinas berupa Maung MV3 buatan PT Pindad. Maung MV3 masuk ke dalam kategori SUV dengan mesin 2.200 cc.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya ingin menggunakan kendaraan sebagai kendaraan resmi kenegaraannya.

Hal itu Prabowo ungkapkan dalam wawancara dengan SCTV yang dikutip Senin (28/10/2024). Prabowo menyampaikan kebanggaannya bisa menggunakan produksi mobil dari bangsa sendiri, bangsa Indonesia.

"Kehormatan bangsa, kebanggaan, sebaiknya kita bisa pakai produk kita sendiri," kata Prabowo.

Prabowo juga mengatakan bahwa ia telah merencanakan tidak hanya presiden saja yang bisa menggunakan Maung Garuda, melainkan juga Menteri/Wakil Menteri, Gubernur/Walikota agar sebagai bentuk kehormatan dan kebanggaan atas produksi bangsa sendiri.

"Jadi saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, semua wakil menteri, dirjen, pejabat mungkin tingkat gubernur bupati walikota sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri," lanjutnya.

Namun, dalam keterangan resminya, Kemenkeu menyebut

pernyataan Anggito dilontarkan pada saat orasi ilmiah kegiatan internal dalam Dies Natalis ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 pada Senin (28/10/2024).

"Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri," kata pihak Kemenkeu.

Klarifikasi itu disampaikan agar publik mengetahui konteks dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan tersebut

Toyota Buka Suara

Artinya, mobil tersebut akan menggantikan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive yang digunakan jajaran menteri sebelumnya.

"Harapan kami, tentu Pemerintah terus memberikan support kepada industri dalam negeri," ujar Anton Jimmy Suwandi, Marketing Director PT TAM, Senin (28/10/2024).

Kemudian, Anton menuturkan bahwa Toyota sendiri memiliki produk-produk yang diproduksi di dalam Negeri. Apabila, Pemerintah membutuhkan dukungan kendaraan, manufaktur asal Jepang ini siap menyediakannya.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, pemerintah melalui Sekretariat Negara melakukan pengadaan mobil menteri pada 2019 lalu. Setelah itu, diumumkan bahwa yang terpilih adalah Toyota Crown 2.5 HV G-Executive.

Sedan mewah tersebut sudah berteknologi hybrid, sehingga lebih ramah lingkungan. Mobil tersebut akan dipakai oleh pejabat setingkat menteri, pimpinan lembaga negara, mantan presiden, dan mantan wakil presiden. Totalnya sendiri mencapai 101 unit.

Toyota Crown 2.5 HV G-Executive

Standar Kendaraan Dinas Pejabat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Menteri dan pejabat yang setingkat mendapat jumlah maksimal 2 unit kendaraan sedan dan/atau SUV atau MPV dengan kelas maksimum Kualifikasi A. Sedangkan wakil menteri mendapat jatah satu unit sedan atau SUV/MPV maksimum Kualifikasi A. Kualifikasi A berarti Sedan, SUV, atau MPV dengan mesin 3.500 cc 6 silinder.

Pejabat Eselon IA dan yang setingkat mendapat jatah satu unit sedan atau SUV dengan kelas maksimum Kualifikasi B. Kualifikasi B berarti sedan 2.500 cc empat silinder atau SUV 3.000 cc 6 silinder.

Pejabat Eselon IB dan yang setingkat mendapat jatah satu unit sedan atau SUV dengan kelas maksimum Kualifikasi C. Kualifikasi C berarti sedan 2.000 cc empat silinder atau SUV 2.500 cc 4 silinder.

Kendaraan Menteri Saat Ini

PT Astra International Tbk-TSO terpilih sebagai penyedia 101 unit kendaraan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive Hybrid untuk menteri dan pejabat tinggi, dengan harga Rp 1,5 miliar. Mobil ini dilengkapi mesin 2.5L Dynamic Force Engine Hybrid System, menghasilkan total tenaga 223 Tk dan torsi 221 Nm. Selain ramah lingkungan, sedan hybrid ini juga hemat bahan bakar, dengan konsumsi hingga 19,4 km per liter.

Kendaraan Menteri Bilal Pakai Maung Pindad

Menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon I dapat menerima mobil dinas Maung MV3 dari PT Pindad, SUV dengan mesin 2.200 cc yang diperkirakan harganya lebih dari Rp1,2 miliar. Kendaraan taktis ringan 4x4 ini, diperkenalkan oleh Prabowo saat menjabat Menteri Pertahanan, dirancang untuk operasi pertempuran jarak dekat dengan manuver gesit. Maung MV3 menggunakan mesin turbo diesel yang mampu mencapai kecepatan 100 km/jam dan jarak tempuh 500 km, serta dapat mengangkut 4 personel dengan 5 pintu akses.

adalah varian dari Crown yang merupakan mobil hybrid, sesuai dengan kodenya HV (Hybrid Vehicle). Mobil ini dibekali mesin 2.5L Dynamic Force Engine Hybrid System. Tenaganya keseluruhannya diklaim mencapai 223 Tk dengan torsi 221 Nm. Selain iramah lingkungan, sedan hybrid ini juga diklaim hemat bahan bakar. Konsumsi bahan bakarnya disebut bisa mencapai 19,4 kilometer per liter.

Mobil ini tidak dijual secara umum di Indonesia. Toyota mengimpornya secara langsung dari Jepang untuk kebutuhan mobil dinas menteri. Mobil buat menteri ini punya harga Rp 1,5 miliar. Harga tersebut sudah termasuk biaya pajak yang membebaninya. (wid, rls, ant/dya)

Ada 329 Calon Daerah Otonomi Baru

DPR Desak Pencabutan Moratorium Pemekaran Wilayah

JAKARTA - DPR RI mendorong semua fraksi untuk mendesak pemerintah mencabut moratorium pemekaran wilayah. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg), Ahmad Doli Kurnia mengaku, hal ini juga sudah ia perjuangkan saat memimpin Komisi II DPR RI pada periode lalu.

"Sekarang ini ada 329 calon daerah otonomi baru yang sudah teregistrasi di Kemendagri sejak moratorium 2014," ujar Doli dalam rapat Baleg pada Senin (28/10/2024).

"Kami menganggap, saya terutama menganggap, bahwa Indonesia kalau mau cepat pembangunannya tidak bisa lagi dihambat tuh pemekaran," sambungnya.

Dia memberi contoh, Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang menurutnya setara dengan Provinsi Sumatera Barat dan Yogyakarta digabung menjadi satu.

Tak hanya Bogor, kata dia. Buktinya, ada lebih dari 300 wilayah yang sudah antri melakukan pemekaran. Sayangnya, saat ini, belum ada jumlah rasional dari hasil kajian berapa daerah otonomi baru yang diperlukan Indonesia. Doli juga menyebut bahwa pemerintah tidak mengerjakan dua peraturan untuk mendukung ini, yakni terkait desain besar otonomi daerah dan pemerintahan daerah.

Politikus Golkar itu beranggapan, DPR harus terlebih dulu merevisi UU tentang Pemerintahan Daerah sebelum menghitung berapa wilayah



Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg), Ahmad Doli Kurnia

yang perlu dimekarkan. "Saya mendorong Bapak-bapak dari semua fraksi, saya kira semua fraksi harus mendorong pemerintah untuk membuka itu moratorium. Periode ini harus ada pemekaran. Karena tidak mungkin lagi tidak ada pemekaran, itu tidak mungkin," ucap dia.

Era Jokowi RI Miliki 4 Provinsi Baru

Diketahui, Indonesia mengukir cerita wilayah baru di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Provinsi-provinsi baru bermunculan, terutama di tanah Papua yang selama ini terpencil, menjelma menjadi tempat lahirnya babak baru pembangunan.

Tambahan ini bukan sekadar perubahan garis di peta, melainkan harapan untuk mempercepat kesejahteraan dan memperkuat identitas daerah yang kerap terpinggirkan

Selama pemerintahan Jokowi, empat provinsi baru muncul, membawa Indonesia dari 34 menjadi 38 provinsi. Langkah ini dianggap sebagai bentuk nyata desentralisasi dan otonomi daerah, yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Jika Presiden Prabowo melanjutkan kebijakan pemerataan dan desentralisasi seperti di era Jokowi, bukan tidak mungkin akan ada tambahan provinsi, terutama di wilayah-wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial yang beragam.

Beberapa wilayah yang kerap diusulkan menjadi provinsi baru, seperti Madura dan Kepulauan Nias, mungkin akan kembali menjadi pembahasan dalam agenda pemerintah

Salah satu yang juga menyita perhatian publik adalah usulan atau wacana, pemekaran Jawa Tengah dengan membentuk tiga provinsi baru.

Pertama, Provinsi Banyumasan yang akan mencakup sejumlah kabupaten dan kota, termasuk Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tegal, Kota

Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.

Calon provinsi kedua adalah Daerah Istimewa Surakarta. Provinsi ini akan mencakup daerah-daerah di Soloraya, seperti Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri.

Calon provinsi ketiga adalah Provinsi Jawa Utara, yang meliputi Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora.

Di tingkat lebih kecil, kontestan Pilkada juga menjadikan isu pemekaran wilayah sebagai targetnya.

Calon gubernur (cagub) nomor urut 01 Airin Rachmi Diany misalnya mengaku setuju dengan gagasan cagub nomor urut 02 Andra Soni soal pemekaran daerah otonomi baru Kabupaten Cilangkahan. Menurutnya, pemekaran juga harus dilakukan di Kabupaten Tangerang.

"Bagi saya, pemekaran bukan hanya untuk selatan saja, wilayah Kabupaten Tangerang pun perlu dimekarkan," kata Airin di Debat Pilgub Banten di Auditorium Menara Bank Mega Kompleks Transmedia, Rabu (16/10/2024).

Airin tidak sepakat dengan Andra Soni soal pemekaran yang hanya melihat disparitas selatan dan utara. Menurutnya, persoalan pemekaran daerah harus melihat kebutuhan.

Pemekaran juga harus dibuat agar birokrasi semakin pendek. Termasuk dalam rangka meningkatkan daya saing daerah tersebut.

"Yang penting celah fiskalnya ada atau tidak, jangan sampe daerah otonom baru jangan jadi beban, tapi dalam rangka kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Menurut Airin, hanya dia cagub yang memiliki pengalaman memimpin daerah otonomi baru. Saat jadi wali kota di Tangerang Selatan (Tangsel), kata Airin, daerah otonomi baru ini berkembang bukan hanya karena

38 provinsi di Indonesia dan ibu kotanya:

- Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh)
- Sumatera Utara (Ibu Kota Medan)
- Sumatera Selatan (Ibu Kota Palembang)
- Sumatera Barat (Ibu Kota Padang)
- Bengkulu (Ibu Kota Bengkulu)
- Riau (Ibu Kota Pekanbaru)
- Kepulauan Riau (Ibu Kota Tanjung Pinang)
- Jambi (Ibu Kota Jambi)
- Lampung (Ibu Kota Bandar Lampung)
- Bangka Belitung (Ibu Kota Pangkal Pinang)
- Kalimantan Barat (Ibu Kota Pontianak)
- Kalimantan Timur (Ibu Kota Samarinda)
- Kalimantan Selatan (Ibu Kota Banjarbaru)
- Kalimantan Tengah (Ibu Kota Palangkaraya)
- Kalimantan Utara (Ibu Kota Tanjung Selor)
- Banten (Ibu Kota Serang)
- DKI Jakarta (Ibu Kota Jakarta)
- Jawa Barat (Ibu Kota Bandung)
- Jawa Tengah (Ibu Kota Semarang)
- D.I. Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta)
- Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya)
- Bali (Ibu Kota Denpasar)
- Nusa Tenggara Timur (Ibu Kota Kupang)
- Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram)
- Gorontalo (Ibu Kota Gorontalo)
- Sulawesi Barat (Ibu Kota Mamuju)
- Sulawesi Tengah (Ibu Kota Palu)
- Sulawesi Utara (Ibu Kota Manado)
- Sulawesi Tenggara (Ibu Kota Kendari)
- Sulawesi Selatan (Ibu Kota Makassar)
- Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi)
- Maluku (Ibu Kota Ambon)
- Papua Barat (Ibu Kota Manokwari)
- Papua (Ibu Kota Jayapura)
- Papua Tengah (Ibu Kota Nabire)
- Papua Pegunungan (Ibu Kota Jayawijaya)
- Papua Selatan (Ibu Kota Merauke)
- Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong)

Provinsi yang Ditambahkan Selama Era Jokowi

• PAPUA SELATAN (2022)

Pemekaran dari Provinsi Papua

• PAPUA TENGAH (2022)

Pemekaran dari Provinsi Papua

• PAPUA PEGUNUNGAN (2022)

Pemekaran dari Provinsi Papua



sosok dirinya tapi karena kolaborasi bersama berbagai pihak.

"Khusus untuk selatan, otonomi daerah baru bisa sangat mungkin dilakukan, insya Allah kita doakan, Pak Prabowo dan Gibran dilantik mudah-mudahan ada untuk moratorium daerah otonomi baru dicabut," paparnya.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan moratorium pemekaran daerah sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tepatnya pada 2006. Moratorium itu dilanjutkan oleh Presiden Jokowi selama dua periode pemerintahannya.

Salah satu alasan dari Pemerintah untuk tetap melakukan moratorium (penundaan sementara) pemekaran daerah adalah belum selesainya Grand Design dan Evaluasi terhadap daerah otonomi daerah (DOB). Selama ini sudah dilakukan yang nantinya akan mengkaji seberapa ideal dan maksimalnya jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia hingga tahun 2025.(wid,ant,ist/dya)

Judol Rugikan Negara Rp 900 T/Tahun

Kapolri: Ini Betul-betul Harus Kita Berantas

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan arahan kepada jajaran kapolda dan kapolres seluruh Indonesia untuk menindaklanjuti Misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Jenderal Sigit menekankan akan menindak tegas pelaku judi online (judol) tanpa ragu.

Hal itu disampaikan Jenderal Sigit saat mengumpulkan seluruh jajarannya di tingkat polda dan polres melalui video conference di Mabes Polri, Senin (28/10/2024).

Jenderal Sigit merespons cepat arahan Presiden Prabowo Subianto di hari pertama setelah mengikuti retreat Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah.

Jenderal Sigit memerintahkan seluruh jajarannya untuk mendukung Asta Cita Presiden RI serta berbagai program dan kebijakan pemerintah lainnya. Salah satunya terkait pemberantasan kejahatan yang memiliki ancaman berat bagi pembangunan bangsa, yakni perjudian online.

Kapolri Perintahkan Jajaran Tindak Kampung Narkoba hingga Jaringan Lapas. Jenderal Sigit mengatakan pihaknya akan melakukan asset tracing atau penelusuran aset yang diperoleh dari hasil perjudian. Tak hanya itu, kepolisian akan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk pemblokiran situs dan rekening yang terlibat dalam perjudian.

"Kemudian capital outflow yang keluar karena kejahatan tersebut, sehingga yang menikmati asing, yang menjadi korban rakyat kita, bangsa kita, ini betul-betul harus kita berantas, sehingga judi online, pinjaman online, ilegal khususnya,



Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat mengumpulkan jajarannya di tingkat polda dan polres seluruh Indonesia melalui video conference di Mabes Polri (dok. Istimewa).

penyelundupan, baik impor ataupun ekspor, narkoba, korupsi, dan segala macam aktivitas ilegal serta hal-hal yang berdampak kepada kebocoran penerimaan dan juga kebocoran terkait dengan penggunaan anggaran," kata Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit juga menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan seperti mencegah kebocoran keuangan negara. Tak hanya itu, Jenderal Sigit juga memerintahkan penegakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian pemerintah, seperti narkoba dan penyelundupan.

Kemudian, Jenderal Sigit memerintahkan jajarannya untuk memberikan dukungan terhadap upaya swasembada pangan dengan melaksanakan berbagai program, termasuk rencana rekrutmen ahli pertanian dan ahli gizi sebagai personel Polri.

Pada kesempatan itu, Jenderal Sigit meminta pejabat Polri untuk segera menyusun penjabaran dari program Presiden Prabowo. Jenderal Sigit memerintahkan penjabaran tersebut harus sudah dilaporkan pada 5 November 2024.

"Segera buat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang," kata Jenderal Sigit.

Sasar Masyarakat Penghasilan Rendah

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan aktivitas judi online telah mengakibatkan negara kehilangan dana hingga ratusan triliun rupiah. Eks Menteri Pertahanan era Joko Widodo itu mengatakan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 900 triliun tiap tahun.

"Banyak yang kena adalah orang-orang berpenghasilan rendah, yang mencoba. Jadi kita harus benar-benar mencoba untuk berantas," kata mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu lewat keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Prabowo mengklaim telah mengetahui dalang dari maraknya judi online di Tanah Air terdiri dari beberapa orang. Ia bahkan mengatakan sebagian dari mereka mengendalikan aksinya dari luar negeri. "Saya kira aktor utama itu ternyata tidak 1-2 orang, beberapa orang, banyak di luar negeri dan

sebagainya," ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Usai mengikuti prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan akan melanjutkan program-program yang telah dijalankan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di bawah pimpinan Budi Arie Setiadi, termasuk pemberantasan judi online.

"Perang beliau (Budi Arie) terhadap judi online pastinya akan kami teruskan bersama-sama. Enggak boleh kendor ya, teman-teman," kata Meutya, dikutip dari Antara.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi online dalam kurun tiga tahun terakhir melonjak tajam dari tahun ke tahun. Pada 2021, perputaran duit judi online mencapai Rp 57 triliun. Jumlahnya naik jadi Rp 81 triliun pada 2022. Pelonjakan tajam terjadi di tahun berikutnya menjadi Rp 327 triliun pada 2023.

Pada 2024, nilai transaksi judi online bahkan lebih dari sekedar membuat geleng kepala. Sementara baru dalam kurun tiga bulan pertama 2024, nilainya bahkan melebihi jumlah setahun penuh periode 2023. PPATK mencatat transaksi judi online per Januari-Maret sudah menyentuh Rp 600 triliun.

Hingga pertengahan September 2024, Kemenkominfo mengklaim telah menutup total lebih dari 3 juta situs judi online. Tepatnya, sebanyak 3.277.834 konten bermuatan judi online telah berhasil diputus aksesnya. (wid, ant, rla/dya)

KAB/KOTA DENGAN JUMLAH TRANSAKSI JUDOL TERBESAR

Kota Jakarta Barat	Rp. 792 miliar
Kota Bogor	Rp. 612 miliar
Kab. Bogor	Rp. 567 miliar
Kota Jakarta Timur	Rp. 480 miliar
Kota Jakarta Utara	Rp. 430 miliar

PEMAIN JUDOL MENURUT USIA



PROVINSI DENGAN JUMLAH TRANSAKSI JUDOL TERBESAR

Jawa Barat	Rp. 3.8 Triliun
DKI Jakarta	Rp. 2.3 Triliun
Jawa Tengah	Rp. 1.3 Triliun
Jawa Timur	Rp. 1.051 Triliun
Banten	Rp. 1.022 Triliun

Bawaslu Ungkap 195 Kades Tak Netral dalam Pilkada 2024

Larangan-larangan yang harus dipatuhi ASN selama masa Pilkada 2024.

- Kampanye/Sosialisasi Media Sosial**
ASN dilarang memposting, membagikan, memberikan komentar, atau menyukai konten yang terkait dengan kampanye calon tertentu di media sosial.
- Menghadiri Deklarasi Calon**
ASN tidak boleh menghadiri acara deklarasi calon kepala daerah atau calon legislatif.
- Ikut Sebagai Panitia/Pelaksana**
ASN dilarang terlibat sebagai panitia atau pelaksana dalam kegiatan kampanye.
- Ikut Kampanye dengan Atribut PNS**
ASN tidak boleh mengikuti kampanye dengan mengenakan atribut yang menunjukkan identitas sebagai pegawai negeri.
- Ikut Kampanye Menggunakan Fasilitas Negara**
ASN dilarang menggunakan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas atau ruangan kantor, untuk kegiatan kampanye.
- Menghadiri Acara Partai Politik**
ASN tidak boleh menghadiri acara yang diadakan oleh partai politik.
- Menghadiri Penyerahan Dukungan Parpol ke Paslon**
ASN dilarang menghadiri acara penyerahan dukungan dari partai politik kepada pasangan calon.
- Mengadakan Kegiatan yang Mengarah pada Keberpihakan**
ASN tidak boleh mengadakan kegiatan yang menunjukkan dukungan atau keberpihakan terhadap calon tertentu, termasuk melakukan ajakan, himbauan, atau seruan.
- Memberikan Dukungan ke Caleg/Calon Independen dengan Memberikan KTP**
ASN tidak boleh memberikan dukungan kepada calon legislatif atau calon independen kepala daerah dengan cara memberikan KTP atau dokumen identitas lainnya.



JAKARTA - Sepanjang masa kampanye Pilkada Serentak 2024, Bawaslu mencatat ada sebanyak 195 kasus dugaan pelanggaran netralitas kepala desa (Kades). Kasus itu tersebar di 25 provinsi yang sudah dilakukan sejak awal masa kampanye sampai hari ini, Senin (28/10/2024).

"Sampai 28 Oktober 2024, terdapat 195 kasus yang tersebar di 25 provinsi dengan rincian, 59 temuan, 136 laporan. Sebanyak 130 kasus diregister, 55 tidak diregister, belum diregister 10 perkara," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ia menyebut, dari total 130 perkara yang diregister, ada 12 perkara merupakan tindak pidana pelanggaran pemilihan. Kemudian, sebanyak 97 kasus merupakan pelanggaran peraturan perundangan lainnya dan 42 kasus dinyatakan bukan pelanggaran. "Dari 130 diregister itu, adalah pelanggaran netralitas kepala desa. Sehingga agenda demokrasi elektoral tingkat lokal yang sedang berlangsung dapat terlaksana secara kompetitif, jujur, adil dan demokratis," ujarnya.

Bagja menjelaskan, dalam Pasal 70 Ayat 1 UU Pilkada terdapat aturan dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa. Atau pun lurah dan perangkat desa maupun perangkat kelurahan.

"Di sebutkan nih, anggota kepala desa dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan. Dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," ucap Bagja.

Karena itu, dirinya mengimbau kepala desa maupun perangkat desa lainnya untuk menjaga netralitas selama masa kampanye Pilkada 2024. Ia berharap imbauan itu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh calon kepala daerah dan tim kampanyenya

untuk tidak melibatkan kepala desa.

"Sehingga, agenda demokrasi elektoral tingkat lokal yang saat ini sedang berlangsung dapat terlaksana baik. Serta kompetitif, jujur, adil dan demokratis," katanya.

Fasilitas Pemerintah Boleh Dipakai Kampanye

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja juga mengatakan, fasilitas milik pemerintah boleh digunakan untuk kampanye dalam Pilkada 2024. Dia mengatakan, salah satu contohnya adalah Gelora Bung Karno yang merupakan fasilitas milik pemerintah. Stadion berkapasitas 88.083 penonton ini sering digunakan untuk acara politik, baik pasangan calon presiden maupun acara partai politik tertentu.

"Boleh-boleh saja. Gelora Bung Karno kan berapa puluh kali menjadi tempat rapat umum. Jadi tidak ada masalah untuk itu," ucap Bagja dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Dalam konteks pilkada, Bagja mengatakan, netralitas tempat-tempat seperti balai desa harus diperhatikan. Balai desa bisa saja digunakan untuk kampanye dengan mekanisme disewakan untuk para calon. Selain itu, balai desa harus diperlakukan setiap calon dengan syarat sewa yang sama.

"Itu masih diperkenankan, tapi kalau sudah aula desanya tidak disewa dan tidak dibuka untuk umum, maka hal itu pun berlaku untuk kampanye," ucapnya. Netralitas kepala desa juga menjadi sorotan Bawaslu RI setelah beberapa peristiwa mobilisasi yang terjadi di berbagai daerah. Bagja mengatakan, meski tetap bisa memilih dalam Pilkada 2024, kepala desa harus menjaga netralitasnya dengan cara tidak berpihak. Sebab itu, Bawaslu mengimbau kembali agar kepala desa atau lurah atau perangkat desa bisa

tetap menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

"Sehingga agenda demokrasi elektoral tingkat lokal yang saat ini sedang berlangsung dapat terlaksana secara kompetitif, jujur, adil dan demokratis," ucap dia.

Adapun perkara netralitas kepala desa yang terakhir menjadi sorotan adalah pengumpulan kepala desa se-Jawa Tengah. Saat itu, Bawaslu Kota Semarang menggerebek pertemuan kepala desa (kades) se-Jawa Tengah (Jateng) yang digelar di sebuah hotel berbintang di Kota Semarang, Rabu (23/10/2024) malam.

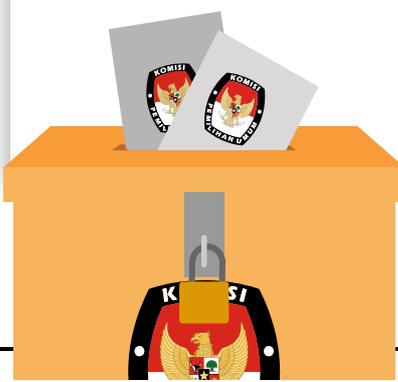
Bawaslu menduga pertemuan ini terdapat muatan untuk memobilisasi dukungan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tertentu dalam Pilkada Jateng 2024.

Ketua Bawaslu Kota Semarang Arief Rahman mengatakan, menurut pengakuan sejumlah kades yang sempat ditanyai Bawaslu, pertemuan itu merupakan ajang silaturahmi. "Sejumlah kades yang hadir saat ditanya mengaku kegiatan ini merupakan silaturahmi dan konsolidasi organisasi Paguyuban Kepala Desa (PKD) se-Jawa Tengah dengan slogan 'Satu Komando Bersama Sampai Akhir'," ujarnya, Jumat (25/10/2024). (wid, rls, ist/dya)

Payung Hukumnya

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Mengatur asas netralitas ASN yang wajib tidak berpihak kepada pengaruh atau kepentingan apapun.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 4 angka 12-15 melarang PNS memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

Pasal 11 huruf c menekankan agar PNS menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.



Hasil Pleno Dugaan Pelanggaran Netralitas di Pilkada Kota Batu Bawaslu Serahkan Kasus 9 Pegawai ke BKN



Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Batu, Mardiono. (Santi/Lenteratoday)

setelah para pegawai tersebut mengunggah sebuah foto bersama salah satu pasangan calon (paslon) di media sosial.

Berdasarkan hasil pleno, Bawaslu Kota Batu memutuskan untuk meneruskan kasus tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditindak lebih lanjut.

"Nah netralitas ASN ini masuk dalam pelanggaran Undang-Undang (UU) atau hukum lainnya. Tetapi ini bukan kewenangan kami untuk

memproses. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Batu, Mardiono, saat dikonfirmasi melalui sambungan selular, Senin (28/10/2024).

Menurut Mardiono, rapat pleno tersebut difokuskan untuk menilai, apakah tindakan yang dilakukan 9 pegawai ini termasuk dalam pelanggaran pemilihan atau bukan.

Dalam ranah Bawaslu, pelanggaran pemilihan yang ditangani meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, dan pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Sedangkan berdasarkan kajian yang dilakukan, kasus ini dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran netralitas ASN, yang kemudian akan diproses oleh BKN dan instansi terkait.

Mardiono menjelaskan, kasus yang menimpa 9 pegawai Pemkot Batu ini, merupakan temuan dari informasi masyarakat. Yang kemudian dilakukan proses penelusuran dan klarifikasi sebelum dibawa ke rapat pleno.

Usai melakukan klarifikasi dan penelusuran lebih mendalam, Bawaslu memutuskan kasus ini memang

berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN. "Nanti di sana yang memproses apakah ini terbukti salah, sengaja, atau tidak," lanjut Mardiono.

Lebih lanjut, Mardiono menyampaikan, Bawaslu akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengawasi proses yang akan dilakukan BKN serta instansi terkait lainnya.

"Prinsipnya, mereka sudah beberapa kali mendapatkan sosialisasi dari Pemkot. Tetapi, saat diklarifikasi awal, mereka mengaku refleks dan tidak ada kesengajaan untuk tidak netral," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu, Santi Restuningsasi, menyatakan Pemkot Batu akan mengikuti aturan yang berlaku dalam menanggapi temuan ini.

"Ya, kita menyesuaikan dengan aturan yang berlaku saja. Sampai sekarang ini yang bersangkutan masih bekerja seperti biasanya," tegas Santi. (Santi/Dya)

BATU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batu telah menyelesaikan rapat pleno terkait dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan 5 aparatur sipil negara (ASN) dan 4 tenaga harian lepas (THL) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Batu. Dugaan pelanggaran ini muncul

DPRD Soroti Belanja Pegawai Kota Malang yang Diproyeksikan Naik Rp 140 M

MALANG - DPRD Kota Malang soroti anggaran belanja pegawai, yang diproyeksikan mengalami kenaikan hingga Rp 140 miliar pada tahun 2025.



Besar harapan kami, Pemkot Malang melakukan pemetaan lebih detail, lebih jeli lagi. Kira-kira seperti apa proyeksi kepegawaian di tahun-tahun berikutnya. Karena belanja pegawai ini gak bisa segampang itu dialihkan sehingga jangan sampai di kemudian hari SiLPAnya lebih besar,"

**AMITHYA RATNANGGANI
SIRRADUHITA**

Ketua DPRD Kota Malang

Peningkatan yang dipicu oleh kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ini, dinilai memerlukan pemetaan lebih cermat agar tidak membebani APBD.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani SIRRADUHITA, mendesak Pemkot untuk merancang alokasi anggaran yang lebih efisien. Guna menghindari potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang tinggi di kemudian hari.

"Besar harapan kami, Pemkot Malang melakukan pemetaan lebih detail, lebih jeli lagi. Kira-kira seperti apa proyeksi kepegawaian di tahun-tahun berikutnya. Karena belanja pegawai ini gak bisa segampang itu dialihkan sehingga jangan sampai di kemudian hari SiLPAnya lebih besar," ujar perempuan yang akrab dengan sapaan Mia ini, Senin (28/10/2024).

Menurut Mia, DPRD Kota Malang juga akan mendorong Pemkot agar lebih responsif dalam mengimbangi kebijakan pusat. Terkait pengangkatan honorer sebagai PPPK, khususnya dalam konteks anggaran daerah.

"Memang dari pusat ada aturan untuk menjadikan honorer sebagai PPPK. Tapi paling tidak bisa diimbangi dengan hal-hal yang bisa dilakukan di tingkat daerah. Di 2025 nanti anggaran untuk belanja pegawai

sudah ada proyeksinya, harusnya bisa 30 persen dari APBD," tambahnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menjelaskan pada tahun 2025, belanja pegawai memang mengalami proyeksi kenaikan dari Rp 992,2 miliar menjadi Rp 1,132 triliun, atau bertambah sekitar Rp 140 miliar.

Iwan mengakui, kenaikan tersebut didominasi oleh anggaran untuk tenaga guru honorer yang kini diangkat menjadi PPPK.

"Prinsipnya, belanja pegawai yang kontribusinya sangat tinggi adalah kaitannya dengan guru, honorer, pengangkatan PPPK. Saya akan jelaskan lebih komplit lagi saat paripurna penjelasan besok," terangnya. Diketahui, dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), diatur pembatasan proporsi belanja pegawai yang maksimal ditetapkan sebesar 30 persen dari total belanja APBD.

Dalam hal ini, Iwan menyampaikan pihaknya telah berupaya



Penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Kota Malang terkait Rancangan KUA-PPAS APBD 2025, Senin (28/10/2024). (Santi/Lenteratoday)

meminimalisir anggaran di pos tersebut, namun kebijakan pusat mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK, memberikan dampak signifikan terhadap belanja pegawai.

"Kemudian keterbukaan ketersediaan lapangan kerja, penguatan di dalam pendidikan, ini juga jadi konsen kita. Sehingga kami gak bisa mencapai apa yang diharapkan terkait 30:70 untuk belanja dan pembangunan," tuturnya. (Santi/Dya)

Kisah Mayor Teddy Indra Wijaya

Dari Ajudan Hingga Sekretaris Kabinet



MAYOR Teddy Indra Wijaya, yang sering kita kenal sebagai ajudan Prabowo Subianto, kini resmi menjabat sebagai Sekretaris Kabinet setelah pelantikan Presiden Prabowo.

Pelantikan ini langsung ramai dibahas, apalagi dengan nama-nama beken menteri Kabinet 2024-2029 yang sedang jadi sorotan publik.

Teddy, lahir di Manado pada 14 April 1989, kini berusia 34 tahun. Ia merupakan sosok yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, terutama setelah perannya sebagai ajudan Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Keduanya telah menjalin hubungan kerja yang erat, dan banyak yang berharap Teddy akan membawa pengalaman dan dedikasi yang sama ke posisi barunya.



1. Jejak Kehidupan Mayor Teddy Indra Wijaya: Dari Latar Belakang Keluarga Hingga Karier Cemerlang di Militer

Latar belakang keluarga Mayor Teddy pun menarik. Ia adalah anak dari Kolonel Inf. (Purn) Giyono dan Mayor Caj (K) Patris R.A. Rumbayan, yang tentunya memberikan pengaruh besar dalam perjalanan karier militernya. Pendidikan Mayor Teddy juga sangat mengesankan; ia berhasil meraih tab ranger di US Army Ranger School ketika berpangkat Kapten.

Lulus dari sekolah yang berada di Fort Benning, Amerika Serikat, pada tahun 2019, Teddy memperoleh predikat International Honor Graduate di antara 185 siswa, termasuk 171 perwira Amerika dan 14 perwira asing. Selain itu, ia juga menerima Commandant List Award dan Gold APFT dengan nilai 100 persen.

Kariernya di militer cukup cemerlang. Teddy pernah tergabung dalam Komando Pasukan Khusus (Kopassus), yang dikenal sebagai salah satu unit elit di Indonesia. Saat berpangkat Letnan Satu (Lettu), ia terpilih menjadi asisten ajudan Presiden Jokowi untuk periode 2014-2019. Dalam posisi ini, Teddy mendapatkan banyak pengalaman berharga dalam mengelola hubungan antar lembaga pemerintah.

Di balik karier yang gemilang, ada juga sisi pribadi Teddy yang tak kalah menarik.

Ia sempat menikah dengan Wita Nidia Hanifah pada 11 September 2018. Meskipun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian, pengalaman ini menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang membentuknya menjadi sosok yang lebih matang.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sempat memutasi Teddy menjadi sebagai Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu melalui Keputusan Kasad nomor Kep. 137/II/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Teddy tetap setia mendampingi Prabowo sebagai Ajudan Menhan.

Kini, Mayor Teddy menerima tugas baru sebagai Sekretaris Kabinet. Tugas Teddy di Sekretariat Kabinet antara lain melaksanakan misi Presiden dan Wakil presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas.

Kemudian, Sekretaris Kabinet juga bertugas untuk memberikan rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan, seperti memberi dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan responsif serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia dan sarana/prasarana di lingkungan Sekretariat Kabinet.

2. Momentum Baru di Kabinet: Teddy Indra Wijaya Siap Menghadirkan Perubahan di Bawah Kepemimpinan Prabowo

Kini, dengan pelantikan Presiden Prabowo Subianto, Mayor Teddy siap membawa perubahan baru di kabinet. Dalam sambutannya, Teddy mengungkapkan komitmennya untuk mendukung program-program pemerintah dan memastikan komunikasi yang efektif antara kabinet dan masyarakat. Dengan pengalaman dan keahlian yang dimilikinya, banyak yang optimis Teddy akan mampu mengatasi tantangan yang ada.

Masyarakat sangat antusias menunggu langkah-langkah yang akan diambil Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Apakah ia dapat memenuhi harapan publik dan mengelola pemerintahan dengan baik? Dengan latar belakang yang kuat dan pengalaman yang kaya, Teddy memiliki potensi untuk menjadi sosok kunci dalam memajukan pemerintahan Prabowo. (nei,ist/dya)

Jamur Lingzhi, Obat Tradisional dengan Beragam Manfaat

JAMUR LINGZHI, atau yang dikenal dengan nama ilmiah *Ganoderma lucidum*, adalah salah satu jenis jamur yang telah dikenal dalam pengobatan tradisional Asia selama ribuan tahun.

Ditemukan pertama kali di hutan-hutan Asia Timur seperti Cina, Jepang, dan Korea, jamur ini sering tumbuh di pohon kayu keras yang sudah mati atau hampir mati. Lingzhi dikenal sebagai "Raja Jamur" karena khasiatnya yang luar biasa dalam meningkatkan kesehatan.

Jamur lingzhi memiliki ciri khas berwarna cokelat keunguan, bertangkai panjang, dan berbentuk seperti kipas. Jamur yang dapat tumbuh di daerah panas dan lembap ini berasal dari kawasan Tiongkok, Jepang, dan Amerika Utara yang juga dibudidayakan di kawasan Asia.

Jamur lingzhi digambarkan sebagai jamur yang sulit dimasak, berstruktur keras, dan terasa pahit. Meski begitu, manfaat jamur lingzhi, khususnya untuk kesehatan cukup beragam. Hal ini berkat sifat antikanker, antiradang, sampai antioksidan yang dimilikinya.

Berbagai Manfaat Jamur Lingzhi

Manfaat jamur lingzhi atau jamur reishi telah tercatat sebagai obat tradisional di negara-negara Asia sejak 2.000 tahun lalu. Spesies jamur yang tercatat sebagai jamur herbal tertua di dunia ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.

Jamur lingzhi mengandung karbohidrat, lemak, serat, protein, dan mineral. Jamur yang bernama Latin *Ganoderma lucidum* ini juga mengandung molekul bioaktif polisakarida, peptidoglikan, dan triterpenoid.

Dengan beragam kandungan di atas, berikut ini adalah beberapa manfaat jamur lingzhi untuk kesehatan yang bisa didapatkan:

1. Mencegah penyakit kanker

Jamur lingzhi kaya akan asam lemak, asam amino, alkaloid, steroid, enzim, triterpenoid, dan polisakarida. Triterpenoid dan polisakarida adalah senyawa yang berkontribusi pada sifat antikanker jamur lingzhi.

Sejumlah uji penelitian klinis menemukan bahwa banyak sel kanker yang mati berkat jamur ini. Penelitian lain menunjukkan bahwa jamur lingzhi dapat menurunkan jumlah dan ukuran tumor di usus besar, serta mencegah kanker kolorektal dan kanker prostat.

Menurut penelitian lain, senyawa bioaktif yang disebut polifenol dan flavonoid pada jamur ini juga dapat mengatasi peradangan yang terjadi pada melanoma dan kanker payudara.

Meski tampak menjanjikan untuk pencegahan dan pengobatan banyak jenis kanker, masih perlu banyak uji klinis lebih lanjut untuk memastikan manfaat jamur Lingzhi sebagai bagian terapi pengobatan kanker.

2. Menurunkan kadar kolesterol jahat

Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa jamur lingzhi mampu menurunkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida. Manfaat tersebut diyakini berasal dari senyawa yang bersifat antioksidan dan antiradang, salah satunya polifenol. Dengan begitu, kesehatan jantung Anda akan tetap terjaga.

3. Menurunkan kadar gula darah

Senyawa polifenol yang bersifat antiradang dalam jamur lingzhi mampu menurunkan kadar gula darah, memperbaiki

resistensi insulin, bahkan mencegah terjadinya komplikasi diabetes. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan manfaat jamur lingzhi untuk penderita diabetes.

4. Mengontrol tekanan darah

Manfaat jamur lingzhi selanjutnya adalah mengontrol tekanan darah. Pasalnya, jamur ini mengandung molekul polisakarida yang mampu mengontrol tekanan darah dengan cara menghambat enzim yang menyempitkan pembuluh darah, sehingga mencegah tekanan darah meningkat. Selain itu, kandungan antioksidan dan antiradang berupa polifenol di dalamnya juga ikut berperan dalam mengontrol tekanan darah.

5. Meningkatkan kekebalan tubuh

Manfaat jamur lingzhi lainnya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dalam satu penelitian disebutkan jika senyawa dalam jamur lingzhi dapat meningkatkan aktivitas sel darah putih untuk melawan infeksi dan penyakit.

6. Melawan depresi dan kelelahan

Tidak hanya meningkatkan kekebalan

tubuh, mengonsumsi jamur lingzhi juga mampu meredakan depresi dan kelelahan. Selain itu, mengonsumsi jamur ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup penderita penyakit tertentu.

7. Mencegah penuaan dini

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sejumlah komponen pada jamur lingzhi memiliki efek antipenuaan. Komponen tersebut adalah polisakarida, triterpen, peptida, dan peptida polisakarida. Senyawa antioksidan yang terkandung pada jamur ini juga mampu melindungi sel-sel tubuh dari dampak radikal bebas.

8. Memelihara fungsi hati

Manfaat jamur lingzhi selanjutnya adalah memelihara fungsi hati. Hal ini diperoleh berkat senyawa polifenol di dalamnya yang bersifat antioksidan. Meski begitu, Anda disarankan untuk tidak berlebihan dalam mengonsumsi jamur lingzhi.

Alih-alih mendapatkan manfaat guna memelihara fungsi hati, jamur lingzhi justru dapat merusak hati bila dikonsumsi berlebihan. Namun, batas jumlah konsumsinya berbeda-beda, tergantung pada usia hingga kondisi kesehatan Anda. Pasalnya, belum ada standar pasti jumlah aman untuk mengonsumsi jamur lingzhi.

Perlu diperhatikan bahwa orang yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, seperti antikoagulan atau antiplatelet, disarankan untuk menghindari konsumsi jamur lingzhi. (nei,ist/dya)



Relief Karmawibhangga di Candi Borobudur

BUKAN GAMBAR BERTAPA BIASA

PENELITIAN pada 105 panel relief Karmawibhangga di Candi Borobudur menunjukkan bahwa candi ini tidak hanya memiliki nilai artistik, tetapi juga menyajikan perspektif biodiversitas dari kacamata queer (inklusivitas atau kecairan). Dalam pandangan ini, tanaman, hewan, dan manusia dianggap setara, sehingga menghindari anggapan hierarki yang menempatkannya.

Hasil penelitian oleh tim dari multidisiplin ilmu tersebut telah dipublikasikan dalam jurnal eTropic pada 14 Agustus 2024 dengan judul 'Queering Tropical Heritage: Relief Flora dan Fauna di Karmawibhangga, Candi Borobudur, Indonesia'. Paparannya diberikan dalam diskusi berani 'Panel Rahasia: QUEER! Narasi panel cerita Flora dan Fauna dan 'Post-human' Karmawibhangga Borobudur' yang digelar Pusat Riset Biosistemika Evolusi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pada Kamis 24 Oktober 2024.

Hasil penelitian oleh tim dari BRIN, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dan Universitas Indonesia (UI) itu menantang pemikiran penelitian sebelumnya oleh arkeolog Belanda, Nicolaas Krom, yang pada tahun 1920 telah meneliti relief Candi Borobudur juga menggunakan metodologi queer. Disebutkan kalau saat itu Krom masih antroposentris.

seluas empat orang yang sedang bermeditasi atau bertapa dalam panel nomor 105 tersebut digambarkan Krom sebagai pria dan karenanya mereka kuat bertahan hidup di alam. Deskripsi yang cenderung



menormalkan dikotomi maskulinitas dan feminitas tersebut dinilai akan membentuk gender biner yang memperkuat gagasan bahwa pria lebih unggul daripada perempuan.

Hasil penelitian terbaru menampilkan praktik spiritual yang ada pada panel yang sama yang meleburkan perpecahan seksualitas dan bahkan menyatukan manusia dengan unsur alam (post-human). "Melihat relief ini, kita tidak fokus pada sentralitas petapa, tapi melihat keseluruhan konteks yang ada dalam relief," kata Aris Arif Mundayat, sosiolog Universitas Sebelas Maret Surakarta, anggota tim peneliti, dalam webinar.

Dia mencontohkan peleburan itu adalah harimau betina yang lebih dulu berburu daripada harimau jantan. Sedangkan post-human didapati dari relief pohon ketapang.

Jika dilihat dari bawah, percabangan daun pohon ketapang ini di empat penjuru mata angin akan terlihat layaknya kondisi inti stupa yang kosong di Borobudur. "Kondisi

suwung (kosong) yang menjadi tujuan utama dalam pertapaan ini," kata peneliti BRIN, Ibnu Maryanto.

Tim juga mengungkap hasil penelitian mereka kebenaran mispersepsi terhadap sesuatu yang dijelaskan berada di atas kepala para petapa pada panel tersebut. Disebutkan, itu adalah hewan gastropoda (keong) yang hermafrodit alias memiliki dua jenis kelamin di setiap individunya.

"Penelitian ini telah meniadakan nilai sentralitas, poin penting dari pendekatan queer dan post-human yang tidak terjadi pada penelitian Krom pada tahun 1920 lalu," kata Aris.

Secara sederhana, queer merupakan teori yang menentang logika oposisi biner yang membagi dunia menjadi dua klasifikasi, seperti baik-buruk, kuat-lemah, laki-laki perempuan, dan seterusnya. Dengan pendekatan ini, peneliti melihat adanya prinsip kesetaraan dan kesalingterhubungan dari seluruh ornamen yang tergambar pada panel.

Sedangkan relief Karmawibhangga

berada di kaki Candi Borobudur terdiri atas 160 panel dengan cerita yang berbeda-beda. Karmawibhangga dipercaya sebagai kumpulan ajaran sang Buddha tentang hukum karma atau hukum sebab akibat.

Dalam penelitiannya, tim fokus pada panel nomor 105 yang dianggap paling rumit karena memuat keanekaragaman flora dan fauna tertinggi. Ada 6 jenis flora dan 8 jenis fauna yang teridentifikasi di panel 105. Analisisnya, antara lain menunjukkan waktu cerita seperti pagi, siang, sore, dan malam sejalan dengan kemunculan fauna-fauna tersebut pada waktu-waktu tertentu saja.

Panel itu dinilai lebih rumit daripada empat orang yang sedang bertapa atau bermeditasi dan dikelilingi oleh flora dan fauna-seperti yang pernah disampaikan Krom. "Dan ini yang harus kita terjemahkan," kata Ibnu.

Menurut profesor penelitian bidang zoologi ini, penggambaran karma pada panel Karmawibhangga tidak hanya menjelaskan prinsip-prinsip atau hukum sebab akibat. Panel tersebut juga menunjukkan gerakan menuju pembubaran dualitas kognitif untuk mengungkap pendekatan yang bertujuan untuk memahami flora-fauna secara utuh.

"Dan manusia tidak hanya ditampilkan sebagai antroposentris saja, tetapi kita harus menegakkannya dalam post-human, kita harus ikut sertakan kesetaraan dalam pengelolaan alam ini," katanya lagi. (nei,ist/dya)



7 Minuman Alternatif Pengganti Kopi di Pagi Hari

MENIKMATI secangkir kopi di pagi hari memang bisa terasa begitu nikmat dan menghangatkan. Bagi banyak orang, kopi bukan hanya minuman, tetapi juga bagian dari ritual untuk memulai hari.

Rasa pahit yang khas dan aroma harum kopi menciptakan pengalaman tersendiri yang sulit diabaikan. Selain itu, efek stimulan kafein pada kopi membuat banyak orang merasa lebih terjaga dan bersemangat.

Tak heran jika minuman ini sering dijadikan teman di pagi hari atau saat bekerja, ketika konsentrasi ekstra sangat dibutuhkan. Namun, tahukah Anda bahwa di balik kenikmatan kopi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait efek sampingnya?

Terlalu banyak mengonsumsi kopi bisa memicu detak jantung yang tidak teratur atau membuat tubuh terasa berdebar-debar.

Ini disebabkan oleh kandungan kafein yang cukup tinggi, yang meski bermanfaat dalam dosis kecil, dapat memicu efek negatif jika dikonsumsi berlebihan. Selain itu, banyak orang juga mengalami masalah tidur jika minum kopi pada waktu yang tidak tepat, terutama di sore atau malam hari.

Tidur yang terganggu akibat konsumsi kopi bisa berdampak pada kualitas kesehatan secara keseluruhan, mulai dari mood yang mudah berubah hingga menurunnya produktivitas.

Tidak semua orang cocok mengonsumsi kopi. Bagi penderita asam lambung atau maag, misalnya, kopi dapat memperburuk kondisi mereka.

Kandungan asam dalam kopi bisa menyebabkan iritasi pada lambung, membuat perut terasa perih, dan bahkan memicu nyeri ulu hati.

Oleh sebab itu, mereka yang memiliki riwayat masalah pencernaan sering disarankan untuk mengurangi atau bahkan menghindari konsumsi kopi demi kesehatan lambung mereka.

Bagi mereka, tentu ada baiknya mencari alternatif minuman yang lebih ramah bagi tubuh.

Nah, berikut masing-masing ulasan minuman pengganti kopi yang bisa dikonsumsi setiap hari.

Untungnya, pilihan minuman sehat yang bisa dinikmati di pagi hari sebagai pengganti kopi cukup beragam.

Bagi sebagian orang, teh menjadi pilihan yang populer. Selain mengandung kafein dalam kadar yang lebih rendah daripada kopi, teh juga memiliki beragam manfaat lain, tergantung pada jenisnya.

The hijau, misalnya, mengandung antioksidan tinggi yang baik untuk kesehatan jantung dan kulit. Sedangkan teh herbal seperti chamomile atau peppermint tidak mengandung kafein dan dapat memberikan efek relaksasi yang cocok untuk memulai hari dengan tenang.

1. The

Ada banyak jenis teh yang bisa Anda coba, mulai dari teh hijau, teh hitam, hingga the herbal.

Dikutip dari Newsweek, teh hijau mengandung kafein yang lebih rendah daripada kopi, tapi tetap bisa meningkatkan fokus dan metabolisme tubuh.

The hitam juga bisa menjadi pengganti kopi yang punya manfaat untuk kesehatan jantung.

Penelitian menunjukkan bahwa orang yang minum teh hitam secara teratur memiliki risiko serangan jantung dan stroke yang lebih rendah.

Kalau Anda ingin yang bebas kafein, teh herbal seperti teh chamomile bisa jadi pilihan yang tepat.

2. Susu kunyit

Pernah dengar minuman ini? Golden milk atau susu kunyit adalah minuman hangat yang terbuat dari susu dan rempah-rempah seperti jahe, kayu manis, kunyit, dan lada hitam.

Rasanya yang kaya dan aromanya yang harum membuat rileks, cocok banget diminum di malam hari. Susu kunyit juga punya sifat anti-inflamasi yang kuat berkat kandungan kurkumin dalam kunyit.

3. Air lemon

Air lemon bisa menjadi pilihan yang simpel dan menyegarkan.

Air lemon tidak hanya membuat Anda terhidrasi, tapi juga kaya vitamin C yang bagus untuk daya tahan tubuh.

4. Kombucha

Minuman fermentasi ini belakangan

cukup digemari para anak muda. Selain rasanya yang unik, kombucha juga mengandung probiotik yang baik untuk pencernaan.

Kombucha mengandung kafein yang lebih rendah dari teh, jadi cocok buat Anda yang ingin mengurangi asupan kafein.

5. Yerba mate

Berasal dari Amerika Selatan, yerba mate adalah minuman herbal dengan kandungan kafein yang mirip kopi, yakni sekitar 78-80 mg per cangkir.

Dikutip dari Healthline, yerba mate memiliki keunggulan berupa kandungan antioksidan dan vitamin seperti riboflavin, thiamine, fosfor, kalsium, dan vitamin C.

6. Cokelat seduh

Jika Anda menyukai rasa cokelat, cokelat seduh bisa menjadi alternatif yang menarik.

Minuman ini memiliki kandungan teobromin yang memberikan energi tanpa meningkatkan denyut jantung seperti kafein.

Cokelat seduh juga kaya akan zat besi, magnesium, dan antioksidan yang membantu meningkatkan mood tanpa efek samping yang umum dari kopi.

7. Smoothie

Nah, kalau yang satu ini pasti jadi favorit banyak orang. Anda bisa membuat smoothie dari buah-buahan, sayuran, yogurt, atau susu.

Natalie Allen, ahli gizi, mengatakan bahwa smoothie adalah pilihan yang bagus untuk sarapan karena mengandung karbohidrat, serat, antioksidan, dan protein. Ini membuat smoothies sebagai pengganti kopi pagi yang menarik.

Jadi, sudah siap mencoba yang mana?

Selain minuman-minuman di atas, masih banyak lagi alternatif pengganti kopi yang bisa Anda eksplorasi, seperti matcha atau cuca sari apel. Intinya, selalu ada pilihan yang lebih sehat dan tetap enak untuk dinikmati selain kopi. Selamat mencoba! (lenteratoday)



Amran Copo ... (dari Hal 1)

MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali mencopot seorang pejabat setingkat direktur di Kementerian Pertanian atau Kementan. Pejabat eselon II yang belum diungkap identitasnya itu dicopot karena diduga terlibat praktik korupsi.

"Berkat informasi nomor kontak pengaduan yang disebarluaskan oleh media, kami menerima lebih dari 100 laporan, meskipun hanya 2 hingga 4 yang dapat dibuktikan," ujar Amran lewat keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Dalam laporan yang diterimanya, politikus-cum-pengusaha ini mengatakan pejabat itu diduga menerima uang pelicin sebesar Rp700 juta. Dari jumlah yang dituduhkan, pejabat ini mengakui menerima Rp500 juta di antaranya.

Bapak dari politik Partai Gerindra Andi Amar Ma'ruf Sulaiman ini mengatakan bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementan untuk memastikan pemeriksaan yang menyeluruh dan langkah hukum yang tepat bagi pejabat ini.

"Tindakan ini kami lakukan atas arahan Presiden (Prabowo Subianto), yang menginginkan kementerian beroperasi dengan profesional dan transparan," kata pendiri perusahaan Tiran Group ini.

Amran mengaku telah menandatangani surat pemberhentian pejabat itu. Kementan juga akan memproses kasus tersebut lebih lanjut melalui pemeriksaan internal dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Menteri dengan kekayaan bersih terbesar ketiga di Kabinet Merah Putih ini berharap, tindakan ini bisa menjadi contoh bagi seluruh pegawai Kementan untuk menjaga integritas.

Amran sebelumnya juga telah menyerahkan tiga pegawai Kementan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas dugaan keterlibatan dalam penyimpangan anggaran. Ketiganya diduga melakukan praktik percaloan dengan meminta uang kepada pengusaha hingga mencapai Rp10 miliar.

Lulusan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin ini mengklaim mencopot ketiganya dalam waktu hanya hitungan menit. Ia mendapatkan laporan soal dugaan keterlibatan tiga orang pejabat itu pada Rabu malam, 16 Oktober 2024. Hari berikutnya, Amran memanggil ketiga pejabat yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya itu.

Selang lima menit pertemuan, ia langsung mencopot mereka. "Kenapa? Karena yang tiga orang ini sudah menerima uang kurang lebih Rp10 miliar dan ini sudah berproses di penegak hukum," katanya.

Jauh ke belakang lagi, Mentan Amran juga mencopot seorang

Direktur berinisial IM karena ketahuan bermain mata dengan calo atau broker dalam kasus pengadaan barang dan jasa.

Pencopotan dilakukan Amran pada Selasa (10/9/2024) pagi, setelah dirinya mendapatkan laporan pada hari yang sama.

Diduga IM dicopot karena bermain mata dengan calo atau broker terkait setoran awal 15-20 persen dari nilai kontrak dalam pengadaan di Kementan.

Di era presiden sebelumnya, Mentan Amran juga mencopot beberapa pejabat lingkup Kementan, mulai dari dirjen hingga direktur, yang dilakukan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mereka sebagai tersangka kasus korupsi.

Dirjen Hortikultura IH ditetapkan sebagai tersangka pada 2016 silam atas kasus pengadaan sarana budidaya mendukung pengendalian OPT, yang merugikan keuangan negara senilai Rp12,947 Miliar.

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, mengapresiasi upaya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Mahfud MD memuji ketegasan Mentan Amran yang mencopot pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) yang terbukti meminta fee pemulus dari perusahaan terkait proyek pengadaan.

"Bagus. Harus begitu, Pak Menteri. Di institusi pemerintah harus tegas, tidak boleh ada paranoid solidarity (solidaritas kalap)," tulis Mahfud dalam cuitannya di akun X @ m o h m a h f u d m d , S a b t u (26/10/2024).

Lebih lanjut, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut menjelaskan tentang paranoid solidarity yang harus ditingkirkan.

"Solidaritas kalap adalah sikap selalu ingin melindungi teman sejawat agar institusi tak tercemar sehingga banyak kasus ditutup-tutupi," lanjutnya.

Oleh karena itu, Mahfud mendukung langkah Mentan Amran untuk tidak menoleransi oknum yang melakukan penyelewengan. "Lanjutkan, Pak Mentan," tegasnya.

Optimistis Swasembada Beras Sebelum 2028

Di sisi lain, Mentan Amran menargetkan status swasembada beras dapat diraih kurang dari empat tahun atau sebelum 2028. Namun, target tersebut bergantung pada perbaikan jaringan irigasi eksisting dan pembangunan jaringan irigasi tersier.

Jaringan irigasi tersier adalah jaringan yang menghubungkan jaringan irigasi primer atau sekunder

dan petak-petak sawah. Adapun jaringan irigasi primer adalah saluran air dari bendungan yang melewati beberapa daerah irigasi.

"Menteri Pekerjaan Umum mengatakan siap memperbaiki semua jaringan irigasi sekunder, jaringan irigasi tersier, dan mengoptimalkan dari dari 61 bendungan ke sawah dalam dua tahun atau pada 2026. Kalau demikian, saya katakan kami siap meraih swasembada sebelum empat tahun," kata Amran di kantornya, Senin (28/10/2024).

Amran menyampaikan, perbaikan jaringan irigasi tersebut akan dibarengi dengan pengadaan benih unggul. Menurutnya, benih tersebut akan dipasok oleh produsen benih milik negara, yakni PT Sang Hyang Seri atau SHS.

SHS memiliki kapasitas produksi sejumlah 136.000 ton benih per tahun. Sementara itu, kebutuhan benih padi per tahun mencapai 300.000 ton untuk melayani luas tanam sekitar 12 juta hektare.

Amran saat ini telah menyiapkan dua strategi produksi untuk mencapai swasembada pangan sebelum 2028, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi. Adapun peningkatan kemampuan pengairan dan benih merupakan bagian dari strategi intensifikasi.

Ia menjelaskan, strategi intensifikasi akan fokus di Pulau Jawa lantaran mayoritas produksi beras ada di Jawadwipa. "Langkah intensifikasi lain adalah pompanisasi untuk memaksimalkan sawah tadah hujan dan distribusi alat mesin pertanian," katanya.

Amran berencana mencetak sawah baru setidaknya 350.000 hektare pada tahun depan dari target 3 juta hektare yang dicanangkan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagian wilayah tersebut ada di Merauke, Papua seluas 1 juta hektare. Sementara itu, sawah seluas 500.000 hektare akan dicetak di Kalimantan Tengah.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Andi Nur Alam Syah sebelumnya menyebutkan rencana untuk mencetak 150.000 hektare sawah di Kalimantan Tengah pada tahun depan. Target ini merupakan bagian dari pengembangan tiga juta hektare sawah hingga 2029.

Nur Alam mengatakan, pencetakan sawah di Kalimantan Tengah akan memanfaatkan kawasan rawa. Namun Nur Alam tidak merinci lebih lanjut lokasi sawah di Kalimantan Tengah tersebut.

"Kami fokus memanfaatkan lahan potensial yang belum tergarap optimal, seperti rawa dan lahan suboptimal, untuk mendukung produksi pangan nasional," kata Nur Alam dalam keterangan resmi, Jumat (25/10/2024).

Nur Alam mengatakan pencetakan sawah hingga 2029 setidaknya akan dilakukan di tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan

Tengah, dan Sumatera Selatan. Sebab, tiga daerah tersebut dinilai memiliki akses irigasi yang memadai.

Terpisah, Wakil Menteri Keuangan Indonesia Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan anggaran untuk program swasembada pangan yang menjadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Anggito sudah terdapat lahan seluas 1 juta hektar sawah di Maluku untuk menyiapkan program swasembada pangan.

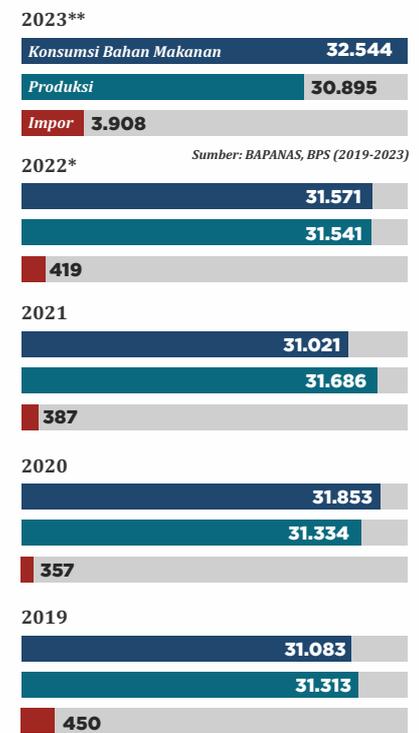
"Beliau (Presiden Prabowo) sudah mencanangkan lima tahun ini swasembada beras, sudah ada embrio-nya di Maluku satu juta hektar sawah sudah dikerjakan. Suatu integrated ekosistem yang sangat bagus," ujar Anggito dalam Rapat Terbuka Senat Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Senin (28/10/2024).

Menurut Anggito Presiden Prabowo menargetkan dapat menyiapkan 3 juta hektar sawah sehingga Indonesia dapat menjadi penghasil beras terbesar di dunia.

"Kalau kita bangun 3 juta maka Indonesia akan menjadi penghasil beras terbesar di dunia, tapi step by step lah satu juta dulu, kami akan siapkan anggarannya, kemudian 3 juta. Nomor satu swasembada make sure kita tidak ada impor beras," jelasnya.

"Make sure kita cukup untuk menghidupi rakyat kita melalui pangan dan produk yang ada," tambahnya. (wid, ant, dat, ist, rls/dya)

Perkembangan Neraca Komoditas Besar Nasional (Ribu ton)



** Angka Sangat Sementara
* Angka Sementara

Giliran Majelis Hakim Kasasi Ronald Tannur Bakal Diperiksa MA

HARTA KEKAYAAN EDWARD TANNUR

TOTAL
RP 11,1 MILIAR

LHKPN pada 31 Desember 2022



Tanah & bangunan

Rp 8.906 Miliar



Kendaraan senilai

Rp 1.462 Miliar



Harta bergerak lainnya

Rp 30 juta



Kas dan setara kas senilai

Rp 744,97 Juta



JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) telah membentuk tim khusus pemeriksaan majelis hakim kasasi Gregorius Ronald Tannur buntut penetapan eks Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA Zarof Ricar (ZR) sebagai ter-sangka suap penanganan perkara itu.

Juru Bicara MA, Yanto, mengatakan tim khusus itu akan memeriksa dugaan pelanggaran etik para hakim agung. "Tentunya majelis yang menangani perkara kasasi Ronald Tannur itu yang akan kami periksa," ucap Yanto dalam jumpa pers di Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, pada Senin (27/10/2024).

Pemeriksaan itu merupakan tindak lanjut dari pernyataan Zarof Ricar yang menyebut dirinya sudah berkomunikasi dengan salah satu hakim agung yang menangani perkara Ronald Tannur di tingkat kasasi. "Keterangan dari Kejaksaan Agung



Pada hari pertama tinggal di Rutan Medaeng, Senin (28/10/2024) nampak Ronald Tannur sudah mencukur rata rambutnya hingga nampak gundul atau plontos. (Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jatim)

bahwa ZR sudah menghubungi salah satu majelis hakim dengan inisial S," tuturnya.

Adapun, ia menegaskan bahwa MA menyerahkan segala proses hukum yang berkaitan dengan dugaan suap Zarof Ricar kepada kejaksaan. MA tak akan campur tangan dalam proses itu.

Sementara itu, pemeriksaan dan klarifikasi terhadap majelis hakim kasasi Ronald Tannur akan dilakukan secara internal. "Kalau etiknya, klarifikasinya, MA sendiri, tidak melibatkan (lembaga luar)," ujar Yanto.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar mengatakan keterlibatan Zarof dalam perkara Ronald Tannur adalah sebagai penghubung antara pengacara anak eks anggota DPR Edward Tannur dan hakim agung untuk pengurusan kasasi.

"Tim penyidik Jampidsus telah menetapkan ZR mantan pejabat tinggi mahkamah agung sebagai tersangka permufakatan jahat bersama LR (Lisa Rachmat) terkait penanganan perkara terdakwa Ronald Tannur di tingkat kasasi," kata Abdul Qohar dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jumat (25/10/2024).

Qohar mengatakan, Zarof diminta Lisa Rachmat untuk melobi hakim agung yang menangani kasasi perkara Ronald Tannur agar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Lisa menjanjikan uang Rp 5 miliar untuk para hakim agung tersebut. "Untuk ZR, diberikan fee Rp 1 miliar atas jasanya tersebut," kata Qohar.

Namun, Qohar menyebut uang Rp 5 miliar tersebut belum sempat disampaikan kepada para hakim

agung yang menangani perkara Ronald Tannur tersebut. "Uangnya masih ada, tapi menurut pengakuannya ZR pernah berkomunikasi dengan salah satu hakim agung itu, nanti kami dalam," kata Qohar.

Ditahan di Medaeng

Terpidana kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur menjalani penahanan sementara di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya di Medaeng Sidoarjo. Pada hari pertama tinggal di Rutan Medaeng, nampak Ronald Tannur sudah mencukur rata rambutnya hingga nampak gundul atau plontos.

Dalam foto yang dibagikan Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Ronald Tannur nampak sedang menjalani pemeriksaan dalam kondisi tanpa rambut. Kapala Rutan Kelas I Surabaya Tomy Elyas membenarkan foto terbaru Ronald Tannur yang beredar tersebut.

Menurutnya, tidak ada maksud lain mengubah model rambut penghuni baru menjadi plontos atau gundul. "Hanya untuk kerapian saja," katanya.

Rutan Kelas I Surabaya menerima Ronald Tannur berdasarkan putusan MA RI Nomor: 1466/Pid/2024 tanggal 22 Oktober 2024. Dia tiba pada Minggu (27/10/2024) pukul 19.30 WIB dan langsung dilakukan pengecekan dokumentasi, pengambilan data untuk kelengkapan selama berada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya serta dilakukan pengecekan kesehatan dan dinyatakan sehat.

Ronald Tannur ditempatkan di blok karantina dan harus mengikuti masa pengenalan lingkungan di Blok A

kamar A3. "Tidak ada perlakuan istimewa, semua tahanan baru harus menjalani proses sesuai SOP yang berlaku," ujarnya.

Putra mantan anggota Fraksi PKB DPR RI itu ditangkap di rumahnya di kawasan perumahan Pakuwon City Surabaya Minggu siang.

Berdasarkan situs MA, vonis 5 tahun penjara ke Ronald Tannur itu diketok oleh majelis Hakim Agung yang diketuai Soesilo dengan anggota Ainal Mardiah serta Sutarjo pada Selasa (22/10/2024).

Putusan kasasi itu membatalkan vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024. Juni 2024, JPU dari Kejati Jatim menuntut Ronald Tannur dengan hukuman 12 tahun penjara. Dia dianggap terbukti melanggar Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Namun, tiga hakim yang kemudian terlibat kasus suap, membebaskan Ronald Tannur. Jaksa pun mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Dalam rangkaian perkara tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Ronald Tannur sebagai tersangka dugaan kasus suap perkara Ronald Tannur. Ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Hari Hanindyo.

Kejasaan Agung juga menetapkan kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Soal hukuman hanya 5 tahun penjara, Juru Bicara MA Yanto mengatakan bahwa dalam perkara ini hakim kasasi menilai Ronald Tannur melanggar Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara.

"Nah terhadap pemidanaan itu menjadi hak daripada majelis hakim yang menangani, lembaga tidak bisa mendikte. Karena hakim adalah mandiri dan independen maka sepenuhnya adalah kewenangan majelis hakim," kata Yanto dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sehingga, Yanto menyebut pihaknya tidak bisa mengintervensi soal keputusan yang sudah diambil oleh majelis hakim tingkat kasasi dalam perkara tersebut.

"Hal tersebut penuh mutlak kewenangan dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut," ujarnya. (wid, ant, pra, ist/dya)